

UJ: Silahkan Periksa

Pontianak, BERKAT.

Anggota DPR-RI yang juga mantan Gubernur Kalbar serta mantan Ketua KONI Kalbar, Usman Ja'far menyambut baik apa yang dilakukan Polda Kalbar dalam layangkan surat izin ke Presiden guna pemeriksaan dirinya dan Ir. H. Zulfadhli sebagai saksi pimpinan cabang olahraga ketika dana Bansos dialirkan.

"Saya secara pribadi siap untuk di periksa sebagai saksi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak masalah kapan saja saya siap memenuhi panggilan Polda Kalbar," kata Usman kemarin usai sosialisasi Kode Etik BK

DPR-RI di gedung DPRD Kalbar.

Menurut Usman pihaknya juga tidak tahu jelas masalah ini.

"Yang jelas Bendahara KONI pada waktu itu yang lebih tahu dan mengetahui aliran dana Bansos. Tapi saya dengan mantan Bendahara KONI," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW, mengatakan pihaknya sudah mengirim surat izin kepada Presiden RI untuk pemeriksaan dua saksi. Saksi yang diperiksa merupakan bagian dari 33 pengurus Cabang olahraga. "Tapi pengirimannya

" Saya secara pribadi siap untuk di periksa sebagai saksi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak masalah kapan saja saya siap memenuhi panggilan Polda Kalbar

USMAN JA'FAR

Anggota DPR-RI

melalui Mabes Polri setelah gelar perkara. Kini Polda sedang menunggu undangan Mabes buat ekspose gelar perkara."

LANJUTAN BACA HAL 11



UJ: Silahkan Periksadari Hal 1

tegasnya.

Namun identitas maupun inisial saksi enggan diutarakan Suhadi yang pemeriksaannya masih menunggu surat izin Presiden. Apabila kedua saksi pengurus cabang olahraga, maka mereka yakni Mantan Gubernur Kalbar atau mantan ketua KONI, Usman Ja'far akrab disapa UJ yang terpilih sebagai anggota DPR-RI priode 2009-2014 Dapil Kalbar. Serta saksi lainnya, Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar Zulfadhli yang kini masih mengemban jabatan sebagai ketua Pengda PSSI Kalbar. Ia juga terpilih pada pemilu legislatif 2009 untuk duduk di Senayan.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi," jelas Suhadi.

Menurut Suhadi, surat izin ke Presiden dilayangkan Polda Kalbar ke Mabes Polri dua pekan lalu. Serta tim penyidik sedang menunggu panggilan untuk ekspose kasus di Mabes. Ekspose tidak sebatas dihadiri internal jajaran kepolisian. Melainkan Kejaksaan Agung, Kemendagri dan KPK. "Kalau ekspose gelar perkara sudah, maka surat dari Polda akan diteruskan Mabes ke Presiden," tuturnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra PON sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar. (aca)